BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 2/TI.01.00/K.JI-10/06/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang :

a. dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efesien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lumajang; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2025 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2024, tanggal 2 Desember 2024;
9. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor : 1/TI.01.00/K.JI-10/03/2025 Tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Lumajang tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2026, tanggal 2 Desember 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Lumajang
Pada tanggal 19 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang,

Lutfiati S.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektroni yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 2/TI.01.00/K.JI-10/06/2026
TANGGAL : 19 Juni 2026

INFORMASI BERKALA							
No	**Ringkasan Isi Informasi**	**Unit Kerja yang Menguasai Informasi**	**Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi**	**Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi**	**Bentuk Informasi Yang Tersedia**		**Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip**
					Cetak	**Online**	
I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu							
1	Alamat Lengkap	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
2	Visi dan Misi	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
3	Struktur Organisasi	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
4	Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
5	Profil Singkat Kepala Sekretariat	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
6	Struktur PPID	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
7	Tugas, Wewenang, Kewajiban	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
II. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu							
8	LAKIP 2018	Pengawasan	Divisi Pengawasan dan Hubal	2018	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
9	LAKIP 2019	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
10	Renja 2019	Keuangan	Keuangan	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
11	Renja 2020	Keuangan	Keuangan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
12	Renja 2021	Keuangan	Keuangan	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
13	Agenda dan Pelaksanaan Tugas	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14	Pengumuman dan Penerimaan	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2018		v	Sesuai dengan retensi arsip
III. Informasi Mengenai Keuangan							
15	Laporan BMN 2019	Administrasi	Divisi OSDM	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
16	Laporan BMN 2020	Administrasi	Divisi OSDM	2020	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
17	Laporan BMN 2021	Administrasi	Divisi OSDM	2021	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
18	DIPA 2017	Keuangan	Keuangan	2017	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
19	DIPA 2018	Keuangan	Keuangan	2018	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
20	DIPA 2019	Keuangan	Keuangan	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
21	DIPA 2020	Keuangan	Keuangan	2020	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
22	DIPA 2021	Keuangan	Keuangan	2021	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
23	LHKPN 2018	Administrasi	Divisi OSDM	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
24	LHKPN 2019	Administrasi	Divisi OSDM	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
25	LHKPN Amin Shobari Tahun 2020	Administrasi	Divisi OSDM	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
26	LHKPN Akhmad Mujaddid M.R. Tahun 2020	Administrasi	Divisi OSDM	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
27	LHKPN Sulastri Wulandari Tahun 2020	Administrasi	Divisi OSDM	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
28	LHKPN Moh. Farhan Tahun 2020	Administrasi	Divisi OSDM	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
29	LJHKPN Yunus Tahun 2020	Administrasi	Divisi OSDM	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
30	LJKPN Az Mashuri Tahun 2020	Administrasi	Divisi OSDM	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektroni
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

31	LHKPN Amin Shobari Tahun 2021	Administrasi	Divisi OSDM	2022		v	Sesuai dengan retensi arsip
32	LHKPN Akhmad Mujaddid M.R. Tahun 2021	Administrasi	Divisi OSDM	2022		v	Sesuai dengan retensi arsip
33	LHKPN Sulastri Wulandari Tahun 2021	Administrasi	Divisi OSDM	2022		v	Sesuai dengan retensi arsip
34	LHKPN Moh. Farhan Tahun 2021	Administrasi	Divisi OSDM	2022		v	Sesuai dengan retensi arsip
35	LJHKPN Yunus Tahun 2021	Administrasi	Divisi OSDM	2022		v	Sesuai dengan retensi arsip
36	LJKPN Az Mashuri Tahun 2021	Administrasi	Divisi OSDM	2022		v	Sesuai dengan retensi arsip
37	LHKPN Amin Shobari Tahun 2022	Administrasi	Divisi OSDM	2023		v	Sesuai dengan retensi arsip
38	LHKPN Akhmad Mujaddid M.R. Tahun 2022	Administrasi	Divisi OSDM	2023		v	Sesuai dengan retensi arsip
39	LHKPN Sulastri Wulandari Tahun 2022	Administrasi	Divisi OSDM	2023		v	Sesuai dengan retensi arsip
40	LHKPN Moh. Farhan Tahun 2022	Administrasi	Divisi OSDM	2023		v	Sesuai dengan retensi arsip
41	LHKPN Yunus Tahun 2022	Administrasi	Divisi OSDM	2023		v	Sesuai dengan retensi arsip
42	LKPN Az Mashuri Tahun 2022	Administrasi	Divisi OSDM	2023		v	Sesuai dengan retensi arsip
43	LHKPN Lutfiati Tahun 2024	Administrasi	Divisi SDMO	2025		v	Sesuai dengan retensi arsip
44	LHKPN Siti Mudawiyah Tahun 2024	Administrasi	Divisi SDMO	2025		v	Sesuai dengan retensi arsip
45	LHKPN M. Syarifudin Lubis Tahun 2024	Administrasi	Divisi SDMO	2025		v	Sesuai dengan retensi arsip
46	LHKPN Moh. Farhan Tahun 2024	Administrasi	Divisi SDMO	2025		v	Sesuai dengan retensi arsip
47	LHKPN Radheteryan Firdiansyah Tahun 2024	Administrasi	Divisi SDMO	2025		v	Sesuai dengan retensi arsip
IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian							
48	Pedoman Pelaporan Dugaan Pelanggaran Oleh Masyarakat	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

49	Pedoman Pengelolaan Kearsipan	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
50	Pedoman Pengelolaan Dana Hibah dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
51	Pedoman Pengelolaan Keuangan Keputusan Sekjen Bawaslu RI	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
52	Pedoman Tata Tertib Pegawai	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
53	Informasi Kepegawaian 2018	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2018		√	Sesuai dengan retensi arsip
54	Informasi Kepegawaian 2019	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2019		√	Sesuai dengan retensi arsip
55	Informasi Kepegawaian 2020	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
56	Informasi Kepegawaian 2021	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik							
57	Daftar Informasi Publik 2019	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2019		√	Sesuai dengan retensi arsip
58	Daftar Informasi Publik 2020	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
59	Daftar Informasi Publik 2021	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
60	Daftar Informasi Publik 2022	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
VI. Informasi Hasil Penelitian							
61	Indeks Kerawanan Pemilu 2019	Pengawasan	Divisi Pengawasan dan Hubal	2018	√		Sesuai dengan retensi arsip
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT							
No	**Ringkasan Isi Informasi**	**Unit Kerja yang Menguasai Informasi**	**Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi**	**Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi**	**Bentuk Informasi Yang Tersedia**		**Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip**
					Cetak	**Online**	
VII. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektroni
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

62	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember	Sengketa	Divisi Penyelesaian Sengketa	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
63	Delarasi Kalah Terhormat, Menang Bermartabat Pemilu 2019	Pengawasan	Divisi Pengawasan dan Hubal	2018	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
64	Perjanjian Kerjasama antara BNN Kabupaten Lumajang dengan Bawaslu Kabupaten Lumajang	Hukum Datin	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2020	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
65	Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Lumajang dengan STIH Jenderal Sudirman Lumajang	Hukum Datin	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2020	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
66	Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Lumajang dengan Bawaslu Kabupaten Lumajang dan Diskominfo Kabupaten Lumajang	Hukum Datin	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
VIII. Informasi Mengenai Pelayanan Publik							
67	SOP Klasifikasi Informasi	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
68	SOP Pelayanan Informasi	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
69	SOP Pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
70	SOP Penanganan Keberatan Informasi	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
71	SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Media Non Litigasi	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
72	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
73	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informas	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
74	SOP Penyusunan DIP	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
75	SOP Uji Konsekuensi	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
76	SOP Penatausahaan Barang Milik Negara	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
77	SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

78	SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
79	SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
80	SOP Persuratan dan Arsip	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
81	SOP Surat Keluar Tata Usaha Pimpinan	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
82	SOP Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Jajaran Pengawas Pemilu (pengadu datang langsung ke kantor)	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
83	SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
84	SOP Pengelolaan Daftar Informasi	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
85	SOP Pelayanan Keberatan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
86	SOP Pengelolaan Keberatan Informasi	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
87	SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Bawaslu RI	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
VIII. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan							
88	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember	Hukum Datin	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
89	Delarasi Kalah Terhormat, Menang Bermartabat Pemilu 2019	Pengawasan	Pengawasan dan Hubal	2019	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
90	Perjanjian Kerjasama antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang dengan Bawaslu Kabupaten Lumajang	Hukum Datin	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2020	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
91	Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Lumajang dengan STIH Jenderal Sudirman Lumajang	Hukum Datin	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2020	v	v	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektroni
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

92	Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Lumajang dengan Bawaslu Kabupaten Lumajang dan Diskominfo Kabupaten Lumajang	Hukum Datin	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021	V	V	Sesuai dengan retensi arsip
IX. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu							
93	Alur Pelaporan Dugaan Pelanggaran	PP	Penanganan Pelanggaran	2020		V	Sesuai dengan retensi arsip
94	Alur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu	PP	Penanganan Pelanggaran	2020		V	Sesuai dengan retensi arsip
95	Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu	PP	Penanganan Pelanggaran	2020		V	Sesuai dengan retensi arsip
96	Alur Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu	PP	Penanganan Pelanggaran	2020		V	Sesuai dengan retensi arsip
97	Alur Penindakan Perbawaslu 2020	PP	Penanganan Pelanggaran	2020		V	Sesuai dengan retensi arsip
98	Alur Sengketa Pemilu	PP	Penanganan Pelanggaran	2020		V	Sesuai dengan retensi arsip
99	Alur Tindak Lanjut Informasi Awal	PP	Penanganan Pelanggaran	2021		V	Sesuai dengan retensi arsip
INFORMASI SERTA MERTA							
No	**Ringkasan Isi Informasi**	**Unit Kerja yang Menguasai Informasi**	**Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi**	**Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi**	**Bentuk Informasi Yang Tersedia**		**Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip**
					Cetak	**Online**	
100	Laporan Akhir Pilbup 2018	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2018	V	V	Sesuai dengan retensi arsip
101	Laporan Akhir Pilgub 2018	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2019	V	V	Sesuai dengan retensi arsip
102	Laporan Akhir Komprehensif 2019	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2019	V	V	Sesuai dengan retensi arsip
103	Laporan Akhir Divisi Hukum, Datin 2019	Hukum Datin	Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	2020	V	V	Sesuai dengan retensi arsip
104	Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran 2019	HPP	Penanganan Pelanggaran	2020	V	V	Sesuai dengan retensi arsip
105	Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa 2019	Sengketa	Penyelesaian Sengkrta	2020	V	V	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

106	Jumlah Penanganan Pelanggaran 2019	HPP	Divisi HPP	2019	v		Sesuai dengan retensi arsip
107	Laporan Akhir Divisi SDMO 2020	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2020	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
108	Laporan Akhir Divisi Pengawasan dan Hubal 2020	Pengawasan	Divisi Pengawasan dan Hubal	2020	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
109	Laporan Akhir PPID 2020	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2020	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
110	Laporan Akhir Kehumasan 2020	Humas	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
111	Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi 2020	Hukum Datin	Divisi Hukum, Humas, dan Datin	2021	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
112	Laporan Akhir Verifikasi Parpol dan Sub Tahapan Verfak dan Verfak Perbaikan Calon Peserta Pemilu Tahun 2024	Sengketa	Penyelesaian Sengketa	2022	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
113	Laporan Akhir Tahun Divisi SDMO dan Diklat Tahun 2022	Organisasi dan SDM	Divisi OSDM	2022	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
114	Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Parmas Tahun 2022	Pengawasan	Divisi Pencegahan Parmas	2022	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
115	Laporan Akhir Kehumasan 2022	Humas	Divisi Kehumasan	2022	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
116	Laporan Informasi Publik Tahun 2022	PPID	Divisi Datin	2022	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
117	Laporan Akhir Layanan Informasi Publik 2023	Datin	Divisi Datin	2024	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
118	Laporan Akhir Pencegahan 2023	Pencegahan	Divisi Pencegahan Parmas	2024	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
119	Laporan Akhir Layanan Informasi Publik 2024	Datin	Divisi Datin	2024	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
120	Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Kabupaten Lumajang Tahun 2024	Humas	Divisi Kehumasan	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
121	Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lumajang Tahun 2024	Sengketa	Divisi Sengketa	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
122	Laporan Akhir Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Lumajang Tahun 2024	Hukum	Divisi Hukum	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektroni
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

123	Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lumajang Tahun 2024	Penanganan Pelanggaran	Divisi Penanganan Pelanggaran	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
124	Laporan Akhir Divisi Pencegahan, Parmas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Lumajang Pada Pemilihan Tahun 2024	Pencegahan	Divisi Pencegahan Parmas	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
125	Laporan Akhir Divisi Pencegahan, Parmas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Lumajang Pada Pemilu Tahun 2024	Pencegahan	Divisi Pencegahan Parmas	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
126	Laporan Akhir Sdmo Kabupaten Lumajang Tahun 2023	SDMO	Divisi SDMO	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
127	Laporan Komprehensif Sdmo Kabupaten Lumajang Tahun 2024	SDMO	Divisi SDMO	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
128	Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024	SDMO	Divisi SDMO	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
129	Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024	SDMO	Divisi SDMO	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
130	Laporan akhir Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Lumajang 2025	Datin	Divisi Datin	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://jdih.bawaslu.goid/

Bawaslu Kabupaten Lumajang